

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Cendana Press, 1983).
- Adji, Indriyanto Seno, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).
- Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ali, Mahrus, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2011).
- Alkostar, Artidjo, Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004).
- Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996).

- Baridwan, Zaki, Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode, (Yogyakarta: BPPE, 2010).
- Basah, Sjachran, Mengenal Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).
- Budiardjo, Miriam, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).
- Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Effendi, Tolib, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013).
- Fauzan, H.M., Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
- Gunadi, Ismu, dkk, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011).
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010).

- Kamil, Ahmad, Filsafat Kebebasan Hakim, (Jakarta: Kencana Pernadamedia, 2016).
- Kartono, Pradilan Bebas (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1982).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
- Latief, Mujahid A, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II), (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007).
- Lumbun, Ronald S., PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Manson, Allan, The Law of Sentencing, Toronto: Irwin Law, 2001.
- McLeod, Raymond, Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1993).
- Moloeng, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 2004).
- Muhammad, Rusli, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2011).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Ed.I, Cet.3, (Bandung: Alumni, 2005).

- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).
- Mulyadi, Lilik, Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Mulyadi, Lilik, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Mulyadi, Lilik, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, (Bandung: PT. Alumni, 2007).
- Mustafa, Bachsan, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Ngani, Nico, Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Norpuko, Chalid dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Nurdjana, I.G.M., Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2006).
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Reksodiputro, Mardjono, Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007).
- Renggong, Ruslan, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

- Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2010).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2006).
- Sudarto, Hukum Pidana I Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013).
- Tahir, Heri, Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Tuanakotta, Theodarus M., Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Yunara, Edi, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020
tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

PERATURAN LAINNYA/SURAT EDARAN

Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang

Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016

JURNAL DAN ARTIKEL

Alasyah, Wana, “Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I
2020”, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020.

Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/ Daerah*, (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018),
halaman 11.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2011).

Djafar, Wahyudi, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum:
Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Devisit Negara Hukum di
Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.5, Oktober 2010.

Herdjito, “Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana
Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08
Jakarta)”, Jakarta: Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, 2014.

Hermawan, Risa, dan Setyawan, “Independensi Hakim Memutus Perkara
Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2020
Jo. Undang-Undang No . 48 Tahun 2009”, *Al-Qanun: Jurnal
Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.24, No.1, 145-169,
Juni 2021.

Indonesia Corruption Watch (ICW), “Tren Vonis Kasus Korupsi 2018”,
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), April 2019.

- Ismail, Rumadan, “Penafsiran Hakim Terhadap Pidana minimum khusus Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan)”, *Jurnal Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2013.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Reksodiputro, Mardjono, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971).
- Rhodes, William, dkk, “Federal Sentencing Disparity: 2005-2012”, *Bureau of Justice Statistics Working Papers Series*, Oktober 2015.
- Subiyanto, “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Lex Jurnalica*, Vol.11, No.1, April 2014.
- Suharno dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 2002).
- Sumbu, Telly, dkk, Kamus Umum Politik & Hukum, (Jakarta: Media Prima Aksara, 2011).
- Suparman, Eman, “Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, Agustus 2014.
- Trisiana, Indah, “Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Banjarnegara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2008).

Wakhidatunisyak, “Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Matematika Materi Himpunan Kelas VII D MTs Assyafi’fah Gondang Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012”, (Skripsi Sarjana Ilmu Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, 2008).

Zaidan, M. Ali, “Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol.1, No.1, Juni 2014.

WEBSITE/INTERNET

Darmawan, Devi, 07 Oktober 2010, “Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”,

<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07 /problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses

pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 20.30 WIB.

<https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022, pukul 06.49 WIB.

<https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022, pukul 11.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 06.49 WIB.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Avianti, Fransiska, “Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008).

Porajow, David Fredriek Albert, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara Yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Perekonomian Negara”, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013).

Wakhidatunisyak, “Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Matematika Materi Himpunan Kelas VII D MTs Assyafi’fah Gondang Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012”, Skripsi Sarjana Ilmu Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, 2008), halaman 16.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/ PT MND

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/ PT SMG

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG